



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019



Sistem Informasi Penelusuran Perkara  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI



PENGADILAN AGAMA  
SUKABUMI

TEL. (0266) 213790 FAX. (0266) 213790

## **PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

Jalan Taman Bahagia No. 19, Kota Sukabumi, Kode Pos 43132

Telepon/Fax. (0266) 213790

Email : [sukabumi.pa@gmail.com](mailto:sukabumi.pa@gmail.com)

Situs : [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id)

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Segala puja dan puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT dan dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.

Adapun maksud penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk memberikan deskripsi secara rinci tentang pelaksanaan tugas yang telah diberikan sesuai dengan Program Kerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2018.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Sukabumi yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tahunan ini, semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi.

Sukabumi, 31 Desember 2019

K E T U A



Dra. Hj. IDA NURSAADAH, S.H., M.H.

NIP. 19660915.199303.2.003

## DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I   Pendahuluan .....	1
Bab II   A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama .....	10
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	10
- Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	12
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	12
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	12
B. Penyelesaian Perkara .....	15
- Jumlah sisa perkara yang diputus .....	15
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .....	16
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	17
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	19
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) .....	20
- Posbakum (yang mendapat alokasi & realisasi anggaran) .....	20
- Sidang keliling/pelayanan terpadu .....	21
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara).....	22
Bab III   Sumber daya Manusia .....	23
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan .....	23
- Mutasi.....	23
- Promosi .....	25
- Pensiun .....	27
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat) .....	27

Bab IV	Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana, Teknologi Informasi	.....28
	A. Pengelolaan Keuangan	.....28
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	.....35
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	.....39
	- Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama	.....39
	- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama	.....39
Bab V	Peningkatan Pelayanan Publik	.....41
	- Akreditasi Penjaminan Mutu	.....41
	- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	.....41
	- Inovasi Pelayanan Publik	.....42
Bab VI	Pengawasan	.....43
	A. Internal	.....43
	B. Evaluasi	.....46
BAB VII	Penutup	.....47
	A. Kesimpulan	.....47
	B. Rekomendasi	.....48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Pengadilan Agama sebagai satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI di Tingkat Pertama memiliki tugas dan fungsi yang orientasinya mengarah terhadap terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung RI sebagai Institusi tertinggi di Badan Peradilan.

Dengan gaungnya semangat Reformasi Birokrasi ditubuh Mahkamah Agung yang diejawantahkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung telah membawa perubahan yang cukup melekat dan signifikan pada Badan Peradilan di bawahnya, hal ini terbukti dengan adanya perubahan-perubahan Pengadilan yang saling berlomba untuk menampakan wajahnya di mata publik, seperti pelayanan publik atau transparansi Pengadilan melalui media yang serba modern.

Visi Badan Peradilan yang Agung dalam Cetak Biru dan Renstra Badan Peradilan 2010-2035 yang nota bene merupakan perwujudan *Grand Design* 2010-2025 Versi Mahkamah Agung RI atau lebih dikenal dengan Reformasi Birokrasi

### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun mengenai organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi

syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (*Quasi Rechtspraak*) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (*Court of Law*) dalam tata hukum di Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain.

Lembaga peradilan yang mandiri (*court of law*) mempunyai ciri antara lain: Pertama, tertibnya administrasi peradilan baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial. Kedua, penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketiga, putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut.

Ketiga hal ini adalah merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara simultan dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat, mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Sukabumi mencoba melakukan pelayanan secara prima, melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan:

1. Penerapan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dalam pelayanan penerimaan dari proses pendaftaran sampai dengan perkara putus dengan sistem pengolahan data melalui komputerisasi dalam program/aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).
2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana direncanakan oleh Mahkamah Agung RI melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-114/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Pengadilan Agama Sukabumi menyambut hal ini dengan wujud nyata salah satunya yaitu dengan penggunaan Teknologi Informasi media internet sebagai bentuk transparansi tersebut adalah dengan adanya website Pengadilan Agama Sukabumi. Dengan alamat Website Pengadilan Agama Sukabumi adalah <http://www.pa-sukabumi.go.id>, harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Sukabumi oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan serta memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data.

Laporan ini berisikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Sukabumi baik yang berkaitan dengan tugas yustisial, administrasi peradilan, kesekretariatan, kepaniteraan maupun tugas lainnya yang berkenaan dengan kedinasan pada tahun 2019 dan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dari program kerja yang telah dicanangkan di samping untuk melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi pada setiap tahun anggaran.

## **B. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pengadilan Agama Sukabumi mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia. Visi dan Misi tersebut ialah :

### **Visi**

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukabumi Yang Agung.

## **Misi**

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Rencana Strategis**

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi yang merupakan bagian dari pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan melaksanakan kekuasaan dengan prinsip merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan peradilan bagi rakyat pencari keadilan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasaskan pada peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sukabumi ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Sukabumi. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi, maka Pengadilan Agama Sukabumi pun telah menetapkan beberapa tujuan, yaitu :

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan keperkaraan pengadilan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern di pengadilan;
3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu:



1. Meningkatnya mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara yang efektif, efisien dan transparan. Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan upaya Pengadilan Agama Sukabumi dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. Diperlukan adanya inovasi dalam pelaksanaan sistem berperkara agar prosesnya tidak berbelit-belit sehingga konsekuensi biaya lain yang mungkin muncul dapat ditekan.

Pengadilan Agama Sukabumi selalu mengusahakan agar setiap perkara yang diterima dapat segera diproses menuju tahapan selanjutnya dan masyarakat tetap diberikan kesempatan untuk memantau perkembangan perkara yang dihadapi. Sepak terjang Pengadilan Agama Sukabumi dapat dilihat dari putusan-putusan yang dihasilkan. Semua putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dimuat dilaman [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id), sehingga setiap masyarakat dapat mengakses putusan dan penetapan setiap waktu dengan mudah.

2. Meningkatnya mutu aparatur pengadilan agama. Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Sukabumi dalam menjalankan beban tugas yang telah diberikan. Terwujudnya sasaran ini akan berkesinambungan terhadap peningkatan penanganan perkara yang lebih efektif, efisien dan transparan. Sehingga akan berdampak pula pada peningkatan mutu pelayanan publik oleh pengadilan.

Pengadilan Agama Sukabumi telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para aparturnya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan pribadi aparatur pengadilan baik dalam bidang yustisi maupun non yustisi.

3. Meningkatnya mutu pelayanan publik. Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik terhadap Pengadilan Agama Sukabumi. Di samping mampu untuk

menjaga independensi dan kemandirian, lembaga peradilan juga harus menjaga dan mempertahankan sistem peradilan yang berkualitas. Kemandirian dan kualitas sistem peradilan tercermin antara lain melalui prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit, biaya yang terjangkau, dan sistem informasi peradilan yang mudah terjangkau oleh setiap pencari keadilan. Tercapainya sasaran ini akan bermuara pada kepuasan masyarakat para pencari keadilan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sukabumi.

4. Meningkatnya kualitas pengawasan. Merupakan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan peningkatan *output* dari setiap pengawasan yang dilakukan, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi formalitas struktural belaka, tetapi menjadi bahan sekaligus tolak ukur dari keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut pemaparan mengenai Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukabumi:

No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
1	Jumlah pendaftaran perkara gugatan/permohonan pada tingkat pertama	Cukup Jelas
2	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	Cukup Jelas
3	Jumlah perkara yang diselesaikan	Cukup Jelas
4	Jumlah minutasasi berkas perkara	Cukup Jelas

5	Jumlah perkara yang dimohonkan sita	Cukup Jelas
6	Jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi	Cukup Jelas
7	Jumlah mediasi yang diselesaikan	Cukup Jelas
8	Jumlah mediasi yang menjadi akta perdamaian	Cukup Jelas
9	Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang telah diregister dengan berkas perkara yang telah siap didistribusikan ke Majelis
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Penjelasan</b>
10	Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara perkara yang telah diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 5 bulan dengan perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
11	Persentase perkara yang tidak diajukan upaya hukum : Banding; Kasasi; dan Peninjauan Kembali	Perbandingan antara perkara yang tidak diajukan upaya hukum dengan perkara yang telah diajukan upaya hukum
12	Jumlah aparatur yang mengikuti bombing teknis administrasi peradilan agama	Cukup Jelas
13	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis kompetensi	Cukup Jelas

14	Persentase aparaturn yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat mediator, ekonomi syariah, asuransi syariah, calon hakim, calon panitera pengganti dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
15	Persentase aparaturn yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat kepemimpinan, pengadaan barang/jasa, PPAKP, dan rintisan gelar dengan SDM yang telah dinyatakan lulus/bersertifikat mengikuti diklat tersebut
16	Jumlah perkara bagi masyarakat kurang mampu yang diselesaikan secara cuma-cuma (prodeo)	Cukup Jelas
No.	Indikator Kinerja	Penjelasan
17	Jumlah perkara yang diunggah ke website Pengadilan Agama Sukabumi dan Mahkamah Agung RI	Cukup Jelas
18	Persentase putusan dan penetapan yang dapat diakses oleh masyarakat	Perbandingan antara putusan dan penetapan yang telah diputuskan dan ditetapkan dalam persidangan dengan putusan dan penetapan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat
19	Persentase penyediaan informasi via papan pengumuman	Perbandingan antara informasi yang siap dipublikasikan dengan informasi yang telah dipublikasikan via papan pengumuman
20	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparaturn peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan
21	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal dengan temuan yang dilaporkan

## **E. Program dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 program pokok yang merupakan penjabaran dari sasaran di atas, yaitu:

### **1. Program Penanganan Perkara Pengadilan Agama**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran Pengadilan Agama Sukabumi dalam penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, sederhana dan biaya ringan;

### **2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.**

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dan teknis yustisial dalam pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi dengan mengedepankan integritas, kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (aparatur pengadilan) di Pengadilan Agama Sukabumi;

### **3. Program Peningkatan Pelayanan Publik.**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kepuasan publik dalam mengakses berbagai macam informasi mengenai perkara-perkara yang sedang dan telah ditangani oleh Pengadilan Agama Sukabumi;

### **4. Program tindak lanjut hasil pengawasan.**

Program ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang tindak lanjut dari setiap pengaduan dan hasil temuan pemeriksaan eksternal di Pengadilan Agama Sukabumi sebagai wujud dari pelaksanaan pengawasan.

## BAB II

### A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

#### - Keadaan Perkara Tingkat Pertama

No	Jenis Perkara	Keadaan Perkara				
		Sisa Akhir 2018	Perkara di terima 2019	Jumlah	Perkara Putus	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
A.	<b>PERKAWINAN</b>					
1	Izin Poligami	-	-	-	-	-
2	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	-	-
3	Penolakan Perkawinan	-	-	-	-	-
4	Pembatalan Perkawinan	-	1	1	1	0
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	-	-
6	Cerai Talak	19	133	152	142	10
7	Cerai Gugat	92	590	682	634	48
8	Harta Bersama	-	1	1	1	0
9	Penguasaan Anak/Hadonah	-	2	2	2	0
10	Nafkah anak oleh ibu karena Ayah tidak mampu	-	-	-	-	-
11	Hak-hak bekas istri/Kewajiban bekas Suami	-	-	-	-	-
12	Pengesahan anak	-	-	-	-	-
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	-	-	-	-	-
14	Perwalian	-	5	5	5	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan	-	-	-	-	-
17	Ganti Rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18	Asal-usul Anak/Pengangkatan Anak	-	1	1	1	0
19	Perkawinan Campuran	-	-	-	-	-

20	Pengesahan Perkawinan / Isbat Nikah	-	120	120	118	2
21	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22	Dispensasi Kawin	-	27	27	25	2
23	Wali Adhol	-	1	1	1	0
<b>B.</b>	<b>Ekonomi Syariah</b>	-	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Waris</b>	1	1	2	2	0
<b>D.</b>	<b>Wasiat</b>	-	-	-	-	-
<b>E.</b>	<b>Wakaf</b>	-	-	-	-	-
<b>F.</b>	<b>Zakat/Infak/Shodaqoh</b>	-	-	-	-	-
<b>G.</b>	<b>Penetapan Ahli Waris</b>	3	18	21	21	0
<b>H.</b>	<b>Derden Verzet</b>	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Lain-lain</b>	-	11	11	11	0
	Jumlah	115	911	1.026	964	62

- Keadaan Perkara Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI  
PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TAHUN 2019**

NO	NOMOR PERKARA	NAMA HAKIM/MAJELIS	TANGGAL			KETERANGAN
			PUTUSAN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS	
1	2	3	4	5	6	7
	BANDING					
1	0144/Pdt.G/2018/PA.Smi	Drs. Jaharuddin	29/10/2018	01/11/2018	17/12/2018	PUTUS
		H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.				07/02/2019
		Drs. Zaenal Mutakin				
2	0397/Pdt.G/2018/PA.Smi	H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.	15/11/2018	29/11/2018	30/01/2019	PUTUS
		Drs. Jaharuddin				11/04/2019
		Drs. Zaenal Mutakin				



3	0484/Pdt.G/2018/PA.Smi	Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H.	24/04/2019	07/05/2019	22/07/2019	PUTUS
		Drs. Jaharuddin				22/08/2019
		Isep Rijal Muharom, S.Ag., MH.				
4	0282/Pdt.G/2019/PA.Smi	Drs. Ase Saepudin H.	25/07/2019	10/09/2019	21/10/2019	PUTUS
						28/11/2019
5	0498/Pdt.G/2019/PA.Smi	Drs. Ase Saepudin H.	28/11/2019	10/12/2019		DALAM PROSES
		Hj. Atin Dariah, S. Ag., M.H.				
		Drs. Zaenal Mutakin				
6	0563/Pdt.G/2019/PA.Smi	Hj. Atin Dariah, S. Ag., M.H.	10/12/2019	19/12/2019		DALAM PROSES
		Drs. Ase Saepudin H.				
		Drs. Zaenal Mutakin				

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL				KETERANGAN	
		PENERIMAAN BERKAS PTA	a.) PUTUSAN PA b.) PUTUSAN PTA*)	PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PA/PTA *)	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS	
1	KASASI 0144/Pdt.G/2018/PA.Smi	11/02/2019	a.) 29-10-2018 b.) 07-02-2019	18/02/2019	08/03/2019	12/04/2019	PUTUS 24/07/2019
NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL				KETERANGAN	
		PENGIRIMAN BERKAS (PTA/MA*)	PUTUSAN PA/PTA/MA *)	PEMBERITAHUAN BUNYI PUTUSAN PA/PTA *)	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS	
1	PK (0190/Pdt.G/2015/PA.Smi) (0041/Pdt.G/2016/PTA.Bdg)	29/01/2016 (PTA)	26/11/2015 (PA) 11/04/2016 (PTA)	26/11/2015 (PA) 25/04/2016 (PTA)	04/12/2019	-	DALAM PROSES

## B. Penyelesaian perkara

### - Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

RK4

#### LAPORAN PERKARA TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI BULAN DESEMBER 2019

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	PERKAWINAN																												Jumlah	Sisa Akhir Bulan									
					Dicabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadonah	Naikah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas isteri	Penghasilan Anak	Pencabutan Kek. Orang Tua	Perwalian	Pencb. Kekuasaan Wali	Penunj. Orang Lain Sbg Wali	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak	Pen. Kawin Campuran	Isbatn Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Pengangkatan anak	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat			Hibah	Wakaf	Zakat / Infaq / Shodaqoh	PJHP / Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur	Dicoret Dari Register
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Januari	115	85	200	5	-	-	-	-	-	12	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	88	112
2	Pebruari	112	77	189	11	-	-	-	-	-	13	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	-	82	107
3	Maret	107	119	226	6	-	-	-	-	-	8	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	80	146	
4	April	146	56	202	10	-	-	-	-	-	10	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	58	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	122	80	
5	Mei	80	48	128	7	-	-	-	-	-	12	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	67	61	
6	Juni	61	60	121	4	-	-	-	-	-	5	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	31	90	
7	Juli	90	85	175	4	-	-	-	-	-	15	47	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	73	102
8	Agustus	102	101	203	13	-	-	-	-	-	12	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	118	85
9	September	85	63	148	7	-	-	-	-	-	8	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	67	81
10	Oktober	81	76	157	6	-	-	-	-	-	13	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	-	81	76
11	Nopember	76	78	154	7	-	-	-	-	-	6	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	61	93	
12	Desember	93	63	156	7	-	-	-	-	-	12	46	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	14	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	2	-	-	94	62
			<b>911</b>	<b>2.059</b>	<b>87</b>	-	-	-	-	-	126	547	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	115	-	25	-	-	-	-	-	-	17	11	4	7	11	8	964		

- Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

LIPA.20

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN			
		DIPUTUS S/D 3 BULAN	DIPUTUS 3-5 BULAN	DIPUTUS LEBIH DARI 5 BULAN	BELUM PUTUS LEBIH DARI 5
1	2	3	4	5	6
1	Januari	67	19	2	-
2	Pebruari	67	14	1	-
3	Maret	67	12	1	-
4	April	113	7	2	-
5	Mei	61	6	-	-
6	Juni	21	10	-	-
7	Juli	68	5	-	-
8	Agustus	112	6	-	-
9	September	59	8	-	-
10	Oktober	73	8	-	-
11	Nopember	57	4	-	-
12	Desember	85	9	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>850</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	

- Jumlah Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

NO	B U L A N	PERKARA MASUK (2019)	PERMOHONAN (PERKARA 2019)			JUMLAH PERKARA 2019 YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM
			BANDING	KASASI	PK	
1	2	12		15	16	
1	JANUARI	85	-	-	-	85
2	FEBRUARI	77	-	-	-	77
3	MARET	119	-	-	-	119
4	APRIL	56	-	-	-	56
5	MEI	48	-	-	-	48
6	JUNI	60	-	-	-	60
7	JULI	85	1	-	-	84
8	AGUSTUS	101	-	-	-	101
9	SEPTEMBER	63	-	-	-	63
10	OKTOBER	76	-	-	-	76
11	NOPEMBER	78	1	-	-	77
12	DESEMBER	63	1	-	-	62
<b>JUMLAH</b>		<b>911</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>

- **Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi**

LIPA. 12

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Keterangan
						Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari	115	85	187	13	13	-	-	-	112	
2	Pebruari	112	77	180	9	8	-	-	-	107	
3	Maret	107	119	213	13	12	-	-	-	146	
4	April	146	56	199	3	2	-	1	-	80	
5	Mei	80	48	119	9	9	-	-	-	61	
6	Juni	61	60	114	7	6	-	-	-	90	
7	Juli	90	85	165	10	9	-	-	-	102	
8	Agustus	102	101	194	9	9	-	-	-	85	
9	September	85	63	145	3	3	-	-	-	81	
10	Oktober	81	76	153	4	3	-	-	-	76	
11	Nopember	76	78	152	2	2	-	-	-	93	
12	Desember	93	63	152	4	4	-	-	-	62	
<b>Jumlah</b>		-	<b>911</b>	<b>1.973</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	-	<b>1</b>	-		

- **Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui Diversi**

Nomor	Perkara yang diterima 2019	perkara berhasil Diversi	Sisa Perkara	Keterangan
	<b>NIHIL</b>			

### C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- Posbakum

**LAPORAN PELAKSANAAN POSBAKUM  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TAHUN 2019**

LIPA 16

NO	BULAN	PAGU AWAL RP	PAGU REVISI RP	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH SERAPAN RP	SISA PAGU	TARGET	JUMLAH LAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	350 Jam	0	
2	Pebruari	35.000.000	-	-	-	-	35.000.000	350 Jam	0	
3	Maret	35.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	31.000.000	350 Jam	40	
4	April	35.000.000	-	4.000.000	11.800.000	15.800.000	19.200.000	310 Jam	118	
5	Mei	35.000.000	-	15.800.000	6.100.000	21.900.000	13.100.000	192 Jam	61	
6	Juni	35.000.000	-	13.100.000	4.100.000	26.000.000	9.000.000	131 Jam	41	
7	Juli	35.000.000	-	26.000.000	-	26.000.000	9.000.000	90 Jam	0	
8	Agustus	35.000.000	-	26.000.000	6.000.000	32.000.000	3.000.000	90 Jam	60	
9	September	35.000.000	-	32.000.000	3.000.000	35.000.000	-	30 Jam	30	
10	Oktober	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	-	0 Jam	0	
11	Nopember	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	-	0 Jam	0	
12	Desember	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000	-	0 Jam	0	
									350	



- **Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

**LAPORAN PELAKSANAAN SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TAHUN 2019**

LIPA 14

NO	BULAN	PAGU AWAL RP	PAGU REVISI RP	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	JUMLAH SERAPAN RP	SISA PAGU	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pebruari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

- **Perkara Prodeo**

**LAPORAN PELAKSANAAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA (PRODEO)  
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI  
TAHUN 2019**

LIPA 15

NO	BULAN	PAGU AWAL RP	PAGU REVISI RP	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN	JUMLAH SERAPAN RP	SISA PAGU	TARGET	JUMLAH PERKARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	7.650.000	-	-	1.836.000	1.836.000	5.814.000	25	6	
2	Pebruari	7.650.000	-	1.836.000	3.672.000	5.508.000	2.142.000	19	12	
3	Maret	7.650.000	-	5.508.000	306.000	5.814.000	1.836.000	7	1	
4	April	7.650.000	-	5.814.000	306.000	6.120.000	1.530.000	6	1	
5	Mei	7.650.000	-	6.120.000	612.000	6.732.000	918.000	5	2	
6	Juni	7.650.000	-	6.732.000	-	6.732.000	918.000	3	0	
7	Juli	7.650.000	-	6.732.000	918.000	7.650.000	-	3	3	
8	Agustus	7.650.000	-	7.650.000	-	7.650.000	-	0	0	
9	September	7.650.000	-	7.650.000	-	7.650.000	-	0	0	
10	Oktober	7.650.000	-	7.650.000	-	7.650.000	-	0	0	
11	Nopember	7.650.000	-	7.650.000	-	7.650.000	-	0	0	
12	Desember	7.650.000	-	7.650.000	-	7.650.000	-	0	0	
									25	

## **BAB III**

### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan**

##### **- Mutasi**

Perlu juga dilaporkan bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sukabumi terjadi beberapa mutasi pegawai yang rinciannya adalah sebagai berikut:

##### **a. Mutasi Pegawai Masuk**

- 1) Drs Ase Saepudin H, Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas 1.B., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 251/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 27 November 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Hakim Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
- 2) Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Cianjur Kelas 1.B., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 251/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 27 November 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Hakim Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 11 Januari 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
- 3) Eneng Siti Rohmah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2518 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
- 4) Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2519 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019

- memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
- 5) Pepep Syarif Hidayat, S.Sy., Staf Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2520 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
- b. Mutasi Pegawai Keluar
- 1) Nina Kristinawati, S.H. ., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2276/DJA/KP.04.6/SK/XI/2018 Tanggal 14 November 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II dan dilantik pada tanggal 18 Januari 2019 di kantor Pengadilan Agama Soreang Kelas II .
- 2) Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. ., Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 48/KMA/SK/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Ketua pada Pengadilan Agama tegal Kelas 1.B. dan dilantik pada tanggal 03 Mei 2019 di kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- 3) Drs. Jaharuddin ., Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 74/KMA/SK/IV/2019 Tanggal 25 April 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Hakim pada Pengadilan Agama Kisaran Kelas 1.B. dan dilantik pada tanggal 11 Juni 2019 Kisaran tegal Kelas 1.B.
- 4) Kurniasari, S.E., S.Sy ., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2217 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1.A dan dilantik pada tanggal 28 Juni 2019 di kantor Pengadilan Agama Agama Cibinong Kelas 1.A

- 5) Asep Husni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2218 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1.A dan dilantik pada tanggal 28 Juni 2019 di kantor Pengadilan Agama Agama Cibinong Kelas 1.A
- 6) Alfath Ibrahim, S.Sy, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2278/DJA/KP.04.6/SK/VI/2019 Tanggal 14 Juli 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II dan dilantik pada tanggal 18 Januari 2019 di kantor Pengadilan Agama Soreang Kelas II .

- **Promosi**

Pada tahun 2019 terdapat 1 orang hakim Pengadilan Agama Sukabumi dan 2 orang pegawai yang mendapat promosi yaitu :

- 1) Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H. ., Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Ketua pada Pengadilan Agama Sukabumi Kelas 1.B. dan dilantik pada tanggal 29 April 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas 1.B.,
- 2) Kurniasari, S.E., S.Sy ., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:

- 2217 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1.A dan dilantik pada tanggal 28 Juni 2019 di kantor Pengadilan Agama Agama Cibinong Kelas 1.A
- 3) Asep Husni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2218 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1.A dan dilantik pada tanggal 28 Juni 2019 di kantor Pengadilan Agama Agama Cibinong Kelas 1.A
  - 4) Eneng Siti Rohmah, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Garut Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2518 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
  - 5) Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2519 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;
  - 6) Pepep Syarif Hidayat, S.Sy., Staf Pengadilan Agama Sumedang Kelas 1.A., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2520 Tahun 2019 Tanggal 27 Mei 2019 memindahkan dan mengangkat dalam jabatan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B

dan dilantik pada tanggal 03 Juli 2019 di kantor Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B;

- **Pensiun**

Pada tahun 2019 terdapat 1 (satu) orang pegawai Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B yang memasuki pensiun, atas nama :

- 1) Rachmat Firmansyah, S.Ag, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Sukabumi, Terhitung Mulai Tanggal 01 Desember 2019 s

- **Diklat**

Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang pegawai Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I B yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut:

- 1) Arif Wiji Hastomo, S.H., Kepala Sub Bagian Kepegawaian , Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Sukabumi mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan Tahun Anggaran 2019 Angkatan XXVIII dan XXIX yang dilaksanakan pada tanggal 03 Februari sampai dengan 25 Mei 2019 bertempat di Balai Diklat Keagamaan Bandung.
- 2) Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sukabumi mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Penyetaraan Sertifikasi Ekonomi Syari'ah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei sampai dengan 25 Mei 2019 bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Kumdil.

**BAB IV**

**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,  
DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. Pengelolaan Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Sukabumi memperoleh 2 DIPA dengan Perincian :

**Eselon I : ( DIPA 01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 Nomor SP-DIPA-005.01.2/400735/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan telah terjadi 9 (sembilan) kali Revisi DIPA Tahun Anggaran 2019 :

1. Revisi ke-1 pada tanggal 12 April 2019 ;
2. Revisi ke-2 pada tanggal 29 Mei 2019 ;
3. Revisi ke-3 pada tanggal 26 Juni 2019 ;
4. Revisi ke-4 pada tanggal 25 Juli 2019 ;
5. Revisi ke-5 pada tanggal 19 Agustus 2019 ;
6. Revisi ke-6 pada tanggal 27 September 2019 ;
7. Revisi ke-7 pada tanggal 05 November 2019 ;
8. Revisi ke-8 pada tanggal 27 November 2019 ;
9. Revisi ke-9 pada tanggal 20 Desember 2019 ;

Untuk DIPA 01 terdapat 2 macam program utama yang utama dengan pagu masing-masing sebagai berikut :

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Rp. 3.217.095.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Rp. 237.500.000,-

**1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung :**

- **Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi :**

**BELANJA PEGAWAI**

**1) Anggaran**

NO	Kode	Kegiatan	Pagu Dipa
1	2	3	4
	<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	932.700.000
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000
3	511121	BelanjaTunj. Suami istri PNS	84.322.000
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	24.922.000



5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.400.000
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional	1.130.425.000
7	511125	Belanja Tunj. Pph PNS	146.633.000
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	48.087.000
9	511129	Belanja uang makan PNS	135.061.000
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	0
			2.538.566.000

## 2) Realisasi

Dari jumlah PAGU DIPA tersebut di atas, realisasi belanja pegawai sampai dengan bulan Desember 2019 sebesar Rp. 2.537.713.747,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar 99,97 % dari yang dianggarkan.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
1	3	4
Belanja Gaji Pokok PNS	932.700.000	932.700.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.000	15.312
Belanja Tunj. Suami istri PNS	84.322.000	84.321.800
Belanja Tunjangan Anak PNS	24.922.000	24.921.258
Belanja Tunjangan Struktural PNS	36.400.000	36.400.000
Belanja Tunjangan Fungsional	1.130.425.000	1.130.425.000
Belanja Tunj. Pph PNS	146.633.000	146.632.497
Belanja Tunj. Beras PNS	48.087.000	48.086.880
Belanja uang makan PNS	135.061.000	134.211.000
Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0
Jumlah	2.538.566.000	2.537.713.747

## 3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Dari PAGU DIPA yang dianggarkan kemudian setelah dilaksanakan hingga bulan Desember 2019 sisa Anggaran Pelaksanaan untuk

Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 852.253,- atau sebesar 0,03%.  
Angka tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut :

NO	Kode	Kegiatan	SISA	
			TOTAL	%
1	2	3	4	5
	<b>51</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>		
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0	0
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	688	4,30
3	511121	BelanjaTunj. Suami istri PNS	200	0
4	511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	742	0
5	511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	0	0
6	511124	Belanja Tunjangan Fungsional	0	0
7	511125	BelanjaTunj. Pph PNS	503	0
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	120	0
9	511129	Belanja uang makan PNS	850.000	0,63
10	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	0	0
			852.253	0,03

## Belanja Barang

### 1) Anggaran

NO	Kode	Kegiatan	Pagu Dipa
1	2	3	4
	<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>	-
		<b>Belanja Barang Operasional</b>	
1	521111	Belanja keperluan perkantoran	281.245.000
2	521114	Belanja Pengiriman surat dinas pos surat	1.800.000
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.600.000
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13.255.000
		<b>Belanja Barang Persediaan</b>	
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.825.000
		<b>Belanja Daya dan Jasa</b>	
5	522111	Belanja Langganan Listrik	26.400.000
6	522112	Belanja Langganan Telepon	7.800.000
7	522113	Belanja Langganan Air	4.800.000

8	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	32.000.000
		<b>Belanja Pemeliharaan</b>	
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.500.000
9	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.384.000
		<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>	
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.320.000
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000

## 2) Realisasi

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

NO	Kode	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	
	<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>		
		<b>Belanja Barang Operasional</b>		
1	521111	Belanja keperluan perkantoran	281.245.000	263.949.064
2	521114	Belanja Pengiriman surat dinas pos surat	1.800.000	1.798.500
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.600.000	33.600.000
4	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	13.255.000	13.255.000
		<b>Belanja Barang Persediaan</b>		
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	41.825.000	41.816.725
		<b>Belanja Daya dan Jasa</b>		
5	522111	Belanja Langganan Listrik	26.400.000	20.943.404
6	522112	Belanja Langganan Telepon	7.800.000	6.253.043
7	522113	Belanja Langganan Air	4.800.000	3.863.199
8	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	32.000.000	32.000.000
		<b>Belanja Pemeliharaan</b>		
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	59.500.000	59.494.500
9	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	108.384.000	106.977.424
		<b>Belanja Perjalanan Dalam Negeri</b>		
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.320.000	64.319.207
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.600.000

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Dari PAGU DIPA yang dianggarkan kemudian setelah dilaksanakan hingga bulan Desember 2019, sisa Anggaran Pelaksanaan untuk belanja barang secara terperinci adalah sebagai berikut :

NO	Kode	Kegiatan	SISA	
			TOTAL	%
1	2	3	4	5
	<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>		
		<b>Belanja Barang Operasional</b>		
1	521111	Belanja keperluan perkantoran	17.295.936	0,94
2	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas	1.500	63,63
3	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	2,78
		<b>Belanja Barang Persediaan</b>		
4	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.275	0,02
		<b>Belanja Jasa</b>		
5	522111	Belanja Langganan Listrik	5.456.596	20,19
6	522112	Belanja Langganan Telepon	1.546.957	23,26
7	522113	Belanja Langganan Air	936.801	65,09
	522141	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim	0	
		<b>Belanja Pemeliharaan</b>		
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.500	0,010%
9	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.406.576	0,020%

**2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

**Belanja Modal dan Belanja Barang**

- a. Pengadilan Agama Sukabumi mendapat alokasi Belanja Modal yang diperuntukan untuk Alat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pembangunan/Renovasi pagar gedung dan bangunan, secara terperinci dipergunakan untuk :

NO	Kode	Kegiatan	Pagu Dipa
1	2	3	4
	<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	-
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.500.000

	<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>-</b>
1	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200.000.000

b. Realisasi

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Semula	Setelah Revisi	REALISASI
1	2	3	4
<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000	37.500.000	37.500.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	199.960.000

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Dari PAGU DIPA yang dianggarkan kemudian secara terperinci adalah sebagai berikut :

No	Kode	Kegiatan	SISA	
			TOTAL	%
1	2	3	4	5
	<b>53</b>	<b>BELANJA MODAL</b>		
1	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,56
2	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	40.000	0,44

**3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan  
Eselon I : (DIPA 04) DIRJEN BADILAG MARI  
Belanja Barang**

a. Pagu

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018 Nomor SP DIPA-005.04.2.400736/2018 tanggal 14 November 2018 bahwa Pagu untuk anggaran belanja Barang adalah sebesar adalah sebesar Rp.42.650.000,- (empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang secara terperinci dipergunakan untuk :

NO	Kode	Kegiatan	Pagu Dipa
1	2	3	4
	<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>	<b>42.650.000</b>
1	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.650.000
2	522131	Belanja Jasa Konsultan	35.000.000

b. Realisasi

Dari jumlah PAGU DIPA tersebut diatas direalisasikan hingga Desember 2019 :

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran Semula	Setelah Revisi	Realisasi
1	2	3	4
<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>		
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Belanja Jasa Konsultan	35.000.000	35.000.000	35.000.000

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Dari PAGU DIPA yang dianggarkan kemudian setelah dilaksanakan hingga bulan Desember 2019 sisa Anggaran secara terperinci adalah sebagai berikut :

NO	Kode	Kegiatan	SISA	
			TOTAL	%
1	2	3	4	5
	<b>52</b>	<b>BELANJA BARANG</b>		
1	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	0
2	522131	Belanja Jasa Konsultan	0	0

**Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

**PNBP Mahkamah Agung RI (BUA)**

No.	Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	219	

2.	423991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	23,581,037	
			<b>23,581,256</b>	

### PNBP Fungsional Mahkamah Agung (Badilag)

No.	Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges)	1.366.000	
2.	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	26.005.000	
3.	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	34.328.200	
			<b>61.699.200</b>	

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### a. Pengadaan

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Sukabumi telah mendapatkan anggaran untuk belanja modal sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja penambahan nilai gedung dan bangunan dan terserap untuk belanja modal sebesar Rp. 237.460.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,98 %.

NO	Belanja Modal				KET
	NILAI DIPA	REALISASI	PENCAPAIAN	SISA	
1	2	3	3	4	5
	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN				
1	37.500.000	37.500.000	100%	0	
	BELANJA PENAMBAHAN NILAI GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	200.000.000	199.960.000	99,98%	40.000	

Pada tahun 2019, pengadilan agama sukabumi mendapatkan Alat Pengolah Data dan Komunikasi pendukung e-court dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai dengan Berita Acara Serah Terima BMN nomor : 046/BUA.7/BAST/BMN-BUN/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang terdiri dari :

No	Nama Barang	Type/Merk	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total
1	2	3	3	4	5
1	Server	Fujitsu TX1330M4	1	84.310.000	84.310.000
2	Rak server	Indorack Standing 19" Standing Close	1	9.866.590	9.866.590
3	P.C Unit	HP AIO Pro One 600 G5	4	12.187.400	48.749.600
4	UPS	APC Back-UPS	4	2.534.000	10.136.000

5	Komputer Jaringan Lainnya	Vestouch Interactive Android Kiosk 21,5	1	17.840.000	17.840.000
---	---------------------------	---	---	------------	------------

## b. Pemeliharaan

### 1) Gedung Bangunan dan Halaman

Pengadilan Agama Sukabumi hingga saat ini memiliki 1 (satu) gedung kantor dan beberapa bangunan penunjang yang terletak di Jalan Taman Bahagia No. 19 Kota Sukabumi. Berkaitan dengan pengelolaan sarana prasarana gedung secara umum pada Pengadilan Agama Sukabumi akan dipaparkan secara umum sebagai berikut:

- 1) Gedung Pengadilan Agama Sukabumi dengan 2 (dua) lantai seluas 370 m<sup>2</sup> (tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan 2 (dua) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terdiri dari:
  - a) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor : 640/Sk.89-PU/1997 tanggal 18 Maret 1997 seluas 280 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi);
  - b) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor : 640/Sk.200-PU/1998 tanggal 29 Desember 1998 seluas 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi).
- 2) Bangunan Musholla Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : PA.i/9/K/BA.03.2/397/2001 tanggal 19 Juni 2001 tentang Pembentukan Susunan Panitia Pembangunan Musholla Pengadilan Agama Sukabumi dan telah diresmikan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : PA.i/9/K/BA.03.2/464/2004 tanggal 06 September 2004 tentang Penyelenggaraan Musholla Pengadilan Agama Sukabumi seluas 35 m<sup>2</sup> (tiga puluh lima meter persegi);
- 3) Bangunan Gudang Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: PA.i/9/K/KS.01.1/120/2005 tanggal 01 Maret 2005 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Pembangunan tempat parkir dan kantin seluas 6 m<sup>2</sup> (enam meter persegi);
- 4) Bangunan Garasi kendaraan dinas Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W10-A12/761/KU.01/IX/2008 tanggal 1 September 2008 berita acara serah terima (BAST) Pekerjaan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/1033/KU.01/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 nilai SPK Rp.12.285.900,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan seluas 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) dialihfungsikan menjadi Bangunan Terbuka Lainnya berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Sukabumi nomor : W10-A12/1480/OL.01/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

Berikut daftar Sarana/Prasarana gedung dan Fasilitas Perkantoran :



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1.	Ruang Ketua	1	Kecil
2.	Ruang Wakil	1	Kecil
3.	Ruang Hakim	1	Sekat dengan ruang rapat
4.	Ruang Panitera	1	Kecil
5.	Ruang Sekretaris	0	Tidak ada ruangan khusus
6.	Ruang Kepaniteraan	1	Bersatu dgn pelayanan
7.	Ruang Kesekretariatan	1	Bersatu dgn Sekretaris
8.	Ruang Sidang	1	
9.	Ruang Mediasi	1	Kecil
10.	Ruang Posbakum	1	
11.	Ruang Tunggu Sidang	1	
12.	Ruang Meja Informasi	1	
13.	Ruang Pelayanan Perkara	1	
14.	Ruang Kasir	1	Hanya sekat
15.	Ruang Jurusita Pengganti	1	Kecil
16.	Ruang Arsip Perkara	1	Kecil
17.	Ruang Arsip Umum	1	Kecil
18.	Ruang Perpustakaan	1	Kecil
19.	Ruang Server	1	Kecil
20.	Ruang Gudang	1	Kecil
21.	Mushola	1	
22.	Ruang Parkir Tamu	1	
23.	Ruang Parkir Pegawai	1	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1.	Server	2	1 Rusak
2.	Komputer	16	
3.	Laptop	10	
4.	PABX	1	
5.	Infokus	1	
6.	Printer	16	
7.	AC	4	
8.	Faximile	1	
9.	Camera DSLR	1	
10.	Scanner	2	
11.	Mesin Absensi	1	
12.	Router	2	
13.	Wireless	4	
14.	Switch/Hub	4	

**Pemeliharaan gedung dan halaman kantor**

NO	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG				KET
	NILAI DIPA	REALISASI	PENCAPAIAN	SISA	
1	2	3	3	4	5
1	57.500.000	57.494.500	99,99%	5.500	Gedung
2	2.000.000	2.000.000	100%	0	Halaman

**Pemeliharaan Peralatan Inventaris Kantor**

NO	PEMELIHARAAN PERALATAN INVENTARIS KANTOR				KET
	NILAI DIPA	REALISASI	CAPAIAN	SISA	
1	2	3	3	4	5
1	2.000.000,-	2.000.000,-	100%	0,-	AC
2	7.200.000,-	7.182.755,-	99,76%	17.245,-	Komputer
3	1.600.000,-	1.600.000,-	100%	0,-	Inventaris

**2) Rumah Dinas**

Terkait Pemeliharaan rumah dinas, Pengadilan Agama Sukabumi belum memiliki rumah dinas, sejak bulan Agustus 2019, Pengadilan Agama Sukabumi mendapatkan anggaran Belanja Sewa Rumah Dinas untuk hakim.

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	-	-	-	-	

**3) Kendaraan Dinas**

Pengadilan Agama Sukabumi sampai dengan tahun 2019 memiliki Kendaraan Dinas sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Toyota Kijang KF 50	1989			v	Lelang Terjual
2.	Toyota Kijang Innova E	2008	v			
3.	Toyota Avanza Veloz	2015	v			
4.	Toyota Altis	2012	v			Pinjam pakai
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1.	Honda Type GL 100	1984			v	Lelang Gagal

2.	Suzuki Satria RU 120	2000			v	Lelang Terjual
3.	Honda GLPro Sport	2006	v			
4.	Honda GLPro Sport	2006				Hilang
5.	Honda Mega Pro Std	2008	v			
6.	Honda Mega Pro Std	2008	v			

Untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas pada tahun 2019, terdapat anggaran sebagai berikut :

#### Pemeliharaan Kendaraan Dinas

NO	PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS				KET
	NILAI DIPA	REALISASI	PENCAPAIAN	SISA	
1	2	3	3	4	5
1	90.984.000	90.089.744	99,02%	894.256,-	Roda 4
2	6.600.000	6.104.925	92,50%	495.075,-	Roda 2

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

#### D. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Agama

##### Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

\*e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);

\*e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);

\*e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online).

##### Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

Sisa Lalu	Perkara Diterima	Beban Perkara	Perkara Dicabut	Perkara Diputus	Sisa Tahun Ini
2	131	133	15	108	10

#### E. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Agama

Sebagai sebuah aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara di pengadilan, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tergolong pesat berkembang. Hal itu bisa dipahami

karena aplikasi ini harus mampu mengakomodasi dinamika para pengguna yang tersebar di sekitar 850 pengadilan seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Kebijakan pimpinan MA, SIPP adalah aplikasi yang dipakai oleh seluruh lingkungan peradilan di bawah MA untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan.

Sisa Lalu	Perkara Masuk	Beban Perkara	Putus	Sisa Minutasi Lalu	Beban Minutasi	Minutasi	Sisa Upload Lalu	Upload Putus Tahun Ini	Prosentase Waktu Putus	Prosentase Waktu Minutasi	Prosentase Bobot Upload	Prosentase Nilai Akhir
115	911	1026	964	0	964	964	2	963	76.41%	87.82%	99.90%	88.04%

## **BAB V**

### **Peningkatan Pelayanan Publik**

#### ▪ **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Pengadilan Agama Sukabumi belum mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) dari Lembaga Sertifikasi manapun sampai dengan akhir tahun 2019.

Pengadilan Agama Sukabumi telah dilakukan Penilaian Eksternal Sertifikat Akreditasi gelombang I Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Dj.A/5/2019 tanggal 8 Mei 2019 dengan menugaskan kepada :

1. Rusli,S.H.,M.H. (Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung) sebagai Asesor.
2. Drs.Muhammad Yamin,M,H. (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat) sebagai Pendamping.
3. Rahmat Setiawan,S.H. (Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat) sebagai Pendamping

Untuk melakukan penilaian eksternal terhadap Pengadilan Agama/Mahkamah Syarriyah yang telah ditentukan pada kegiatan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 20`18 mulai tanggal 19 s/d 31 Mei 2019.

Pengadilan Agama Sukabumi telah menerima Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama di Balikpapan Kalimantan Timur pada tanggal 12-14 Juli 2019 tempat di Hotel Novotel Balikpapan Kalimantan Timur dengan Akreditasi "A EXCELENT".

Pengadilan Agama Sukabumi harus siap menerima kunjungan pelaksanaan Asesment Surveillance yang akan dilaksanakan pada :

1. JUNI 2019.
2. JUNI 2020.
3. JUNI 2021,

#### ▪ **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan di satu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja. Layanan satu pintu Pengadilan Agama Sukabumi menempatkan wakil

dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana dan hukum untuk melayani pengunjung pengadilan serta petugas e-court untuk melayani di meja e-court.

▪ **Inovasi Pelayanan Publik**

Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi; merupakan inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi, yaitu:

1. Mengembangkan website Pengadilan Agama Sukabumi di [www.pa-sukabumi.go.id](http://www.pa-sukabumi.go.id);
2. Penginputan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) secara berkelanjutan;
3. Menyiapkan informasi elektronik dan brosur tentang informasi E-court.

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan pengawasan di Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, mengacu kepada Pedoman Pengawasan Peradilan yang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, maka Pengadilan Agama Sukabumi dalam melaksanakan tugas pengawasan internal telah dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Sistem pengawasan harus dilakukan secara internal maupun eksternal dan dilaksanakan secara terprogram dan terkoordinasi untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengawasan mempunyai fungsi monitoring dan pengendali pelaksana program kerja suatu unit kerja atau lembaga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus mengarahkan tercapainya tujuan program kerja.

Dalam rangka peningkatan tugas-tugas pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sukabumi adalah dengan melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 dengan melakukan kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya secara berjenjang, baik secara preventif maupun represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan peraturan yang berlaku. Dalam pengawasan ini telah pula dibuatkan dan dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang sebagai kepanjangan tangan dari Pimpinan Pengadilan Agama Sukabumi yang dilaporkan secara berkala setiap triwulan sekali dan dievaluasi perkembangannya. Semua Hakim di Pengadilan Agama Sukabumi terlibat dalam tugas ini yang dibagi sesuai dengan bidang-bidang pekerjaan seluruh karyawan di Pengadilan Agama Sukabumi.

Pencapaian tujuan pengawasan dan pembinaan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena membenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Adapun pengawasan dan pembinaan di Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0230/PS.00/I/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dan sehubungan salah satu Hakim Pengawas Bidang mutasi dari Pengadilan Agama Sukabumi ke Pengadilan Agama Kisaran maka ada perubahan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/1172/PS.00/VI/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sukabumi telah dilaksanakan untuk periode Bulan Januari s.d. April 2019;
- b. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sukabumi telah dilaksanakan untuk periode Bulan Mei s.d. Agustus 2019.
- c. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sukabumi telah dilaksanakan untuk periode Bulan September s.d. Desember 2019.
- d. Pengawasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan jum'at tanggal 24 sampai dengan 26 April 2019 berdasarkan surat tugas Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/1650/KP.03/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dan Nomor : W10-A/1652/KP.03/IV/2019 tanggal 23 April 2019 dengan memberi tugas kepada:
  1. Drs.H.HARMAEN,M.H. NIP.19520808 198103 1 008 Pembina Utama (IV/e) Hakim Utama/Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.



2. ACHMAD CHOTIB ASMITA,S.Ag. NIP.19630305 198503 1 007 Pembina (IV/a) Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  3. EDI SOPANDI. NIP.19620518 198503 1 003 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
- e. Kunjungan Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2019 beserta rombongan yang terdiri dari:
1. Drs.H.M. TAUFIQ H.Z, M.H.I. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  2. Drs.Agus Zaenal Mutakin,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  3. R.Jaya Rahmat,S.Ag.M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  4. H.Mohamad Hasan Shodiq Abdurahman,S.H.I. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  5. Ahmad Muzayyin Destu Ladoe,S.Sy. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah.
6. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sewa Mesin Fotokopi Satuan Kerja Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Desember 2019 berdasarkan surat tugas Plh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/5193/HM.01/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dengan memberi tugas kepada:
1. SYARIF BASTAMAN,S.E. NIP.19791123 200604 1 006 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
  2. TAUFIK MAULANI,S.H.I.. NIP.19830318 201408 1 001 Penata Muda (III/a) Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

Untuk memaksimalkan kegiatan pembinaan dan pengawasan Hakim Pengawas Bidang maka ditunjuk Pembina dan coordinator pengawas berdasarkan Surat

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/1210/PS.00/VI/2019 tentang penunjukan Pembina dan Koordinator Pengawas pada Pengadilan Agama Sukabumi.

## **B. Evaluasi**

Memperhatikan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : W10-A12/0230/PS.00/I/2019 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Sukabumi agar Pengawas Bidang melaksanakan terus tetap berkesinambungan dan hasil pengawasan tersebut di Pengadilan Agama Sukabumi baik di bidang administrasi keperkaraan maupun di bidang administrasi kesekretariatan dapat dirasakan peningkatannya, sehingga tertib administrasi di lingkungan keperkaraan dan kesekretariatan dapat secara optimal.

Pengadilan Agama Sukabumi dengan komitmen dan fokus terhadap pembenahan organisasi dan peningkatan kualitas profesional aparatur dengan mengerakan seluruh elemen yang meliputi bidang administrasi keperkaraan, administrasi kesekretariatan teknis, pengawasan internal maupun pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur.

Dengan dilaksanakan pengawasan internal tersebut diharapkan adanya perbaikan dan perubahan serta peningkatan dalam tertib administrasi serta peningkatan capaian target kinerja yang optimal agar dapat mengukur kinerja yang produktif, efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Agama Sukabumi dalam mewujudkan reformasi Birokrasi sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan mengenai keadaan dan kegiatan Pengadilan Agama Sukabumi selama tahun 2019, maka dapat ditarik suatu simpulan meliputi 2 sektor yaitu :

##### 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan

- a) Penyelesaian perkara tahun 2019 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari sisa perkara tahun 2017 sebanyak 100 perkara dan perkara yang diterima sepanjang tahun 2019 sebanyak 728 perkara, sehingga seluruhnya berjumlah 828 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus adalah sebanyak 625 perkara, maka sisa perkara akhir tahun 2019 adalah sebanyak 98 perkara;
- b) Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Sukabumi telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan.

##### 2. Sektor Administrasi Kesekretariatan

- a) Berdasarkan hasil *analysis staffing assesment* dan pemetaan jabatan, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan kuantitas antara formasi jabatan dengan kebutuhan terlebih lagi dengan formasi sesuai dengan Standar KMA 143/2007. Hal tersebut mengakibatkan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Sukabumi masih sangat jauh dari jumlah ideal, sehingga banyak pegawai yang mengemban tugas rangkap bahkan lebih;
- b) Adanya penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian yang ganda dan duplikat antara aplikasi ABS dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dan aplikasi SIKEP dari Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang mengakibatkan pemborosan tenaga dalam bekerja dan tidak memenuhi

perintah Sekretaris Mahkamah Agung RI berdasarkan Angka 1 Surat Edaran Nomor: 197-1/SEK/KU.01/7/2015 Tanggal 27 Juli 2019 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI sebagai database tunggal/pokok yang valid, akurat dan *up to date*;

- c) Pengelolaan keuangan yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan dan diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu. Namun demikian, masih ada kendala seperti perencanaan anggaran yang perlu alokasi waktu yang cukup, serta pelaksanaan anggaran yang terpola dengan baik dan pelaporan yang tepat, akurat serta tepat waktu.

## **B. Rekomendasi**

Sebagai bahan perbaikan di tahun yang akan datang, maka kami Pengadilan Agama Sukabumi mengajukan beberapa rekomendasi yaitu :

1. Pembinaan Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitas dalam Rangka mewujudkan sumber daya manusia yang handal;
2. Penambahan pegawai untuk Pengadilan Agama Sukabumi terutama untuk pelaksana perlu mendapat prioritas, sehingga pelayanan kepada pencari keadilan dapat terlaksana dengan baik;
3. Dengan adanya pengembangan sistem informasi teknologi di Pengadilan Agama Sukabumi hendaknya dibarengi dengan peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang Teknologi Informasi, sehingga hendaknya dana pemeliharaan untuk pengembangan informasi teknologi (IT) tersebut agar lebih diperhatikan;
4. Perlu diadakannya sosialisasi dan pembinaan ke daerah-daerah khususnya kota Sukabumi tentang buku-buku petunjuk pelaksanaan administrasi ketatalaksanaan, kearsipan, humas dan keprotokolan serta standarisasi sistem keamanan dan ketertiban kantor;

5. Perlu adanya penganggaran belanja modal guna meremajakan sarana dan prasarana yang ada agar tetap layak pakai dan mendukung pelaksanaan tupoksi;
6. Perlu adanya peningkatan dalam hal pembinaan ke daerah-daerah mengenai administrasi pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif diinformasikan ke daerah-daerah secara integral, tertib dan teratur berdasarkan pada pola-pola yang sudah ada.